

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBERIAN KUASA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
No.32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS)



OLEH
BILL LUKMAN LO
B11112004

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017

HALAMAN JUDUL

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBERIAN KUASA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
No.32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS)

OLEH
BILL LUKMAN LO

B111 12 004

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBERIAN KUASA (Studi Kasus Putusan No.32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

BILL LUKMAN LO

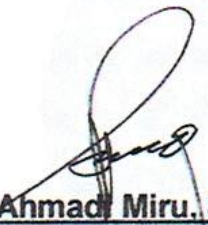
B111 12 004


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 25 April 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

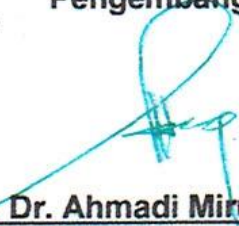
Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP 19610607 198601 1 003


Dr. Mustafa Bola, SH.MH.
NIP 19540104 198303 1 007

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP : 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : BILL LUKMAN LO

Nomor Pokok : B 111 12 004


Bagian : HUKUM KEPERDATAAN

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM
PEMBERIAN KUASA (Studi Kasus Putusan No.
32/PID.SUS.KOR/ 2012 / PT.MKS).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP 19610607 198601 1 003

Pembimbing II



Dr. Mustafa Bola, SH.MH.
NIP 19540101 198303 1 007



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: BILL LUKMAN LO
Nomor Pokok	: B11112004
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tanggung Jawab Direksi Dalam Pemberian Kuasa (Studi Kasus Putusan No.32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2017 *a*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 196106071986011003

ABSTRAK

Bill Lukman Lo. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Pemberian Kuasa (Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.32/Pid.Sus.Kor/2012/PT. Mks)* Dibimbing oleh **Ahmadi Miru** dan **Mustafa Bola**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab direksi selaku pemberi kuasa baik dari sudut pandang hukum perdata maupun hukum pidana, atas perbuatan penerima kuasa yang menyimpang dari kuasa yang diberikan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa direksi selaku pemberi kuasa dianggap harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan penerima kuasa yang melampaui kuasa yang diberikan sehingga direksi selaku pemberi kuasa juga dikenakan sanksi pidana akibat perbuatan penerima kuasa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa perbuatan penerima kuasa yang melampaui batas pemberian kuasa yang diberikan dan merupakan tindak pidana juga menjadi tanggung jawab pidana dari pemberi kuasa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1979 *BW* dan Pasal 1801 *BW* sehingga Penulis menyarankan agar dalam menjatuhkan suatu putusan seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 1979 *BW* dan Pasal 1801 *BW* yang masih berlaku sampai saat ini.

ABSTRACT

Bill Lukman Lo. *Responsibilities of Directors In Authorization (High Court Makassar 32 / Pid.Sus.Kor / 2012 / PT. Mks)* Supervised by **Ahmadi Miru** and **Mustafa Bola**.

The Aims of this research is to determine the responsibility of the directors who give the authority from the perspective of civil law and criminal law, the actions of the endorsee that deviate from the given power.

Type of the research used in this paper is a normative legal research. The approach used in writing this essay adapted to the type of research undertaken writer. Therefore, the approaches which are applied include statute approach, case approach, as well as conceptual approach.

Based on the result of the research, the authors found that the directors as the authorizing deemed to be criminally responsible for the actions endorsee beyond the power given to the directors as the authorizer is also subject to criminal sanctions resulted from an act of the endorsee that meets the elements of a criminal offense.

The conclusion of this discussion is that the acts of the endorsee which exceed the limits of authorization granted and constitute a criminal offense is also a criminal liability of the endorser. This is contrary to the provisions of Article 1979 BW and Article 1801 BW so the authors suggest that in dropping a decision of the judges should also consider the provisions of Article 1979 BW and Article 1801 BW which is still in force today.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak terhingga Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia, berkat dan penyertaanNya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan dan penelitian skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBERIAN KUASA (Studi Kasus Putusan No.36/PID.SUS.KOR /2011/PN.MKS Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.32/Pid.Sus.Kor/2012/ PT. Mks)**” dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, **Suyono Lukman** dan **Padma Dewi Liman** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan didikan yang membangun pribadi Penulis menjadi lebih baik. Pencapaian Penulis tidak dapat terlepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam segala kondisi. Juga kepada saudara Penulis, **Melina Dewi Lukman Lo** dan **Monica Dewi Lukman Lo** terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik

materiil maupun non-materiil, sehingga pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I (satu) dan Bapak **Dr. Mustafa Bola, SH., M.H.** selaku Pembimbing II (dua) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh kedua dosen yang sangat luar biasa.
4. Para dosen penguji ujian skripsi, **Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., Dr. Harustiati A. Moein, S.H., M.H** dan **Dr. Hasbir B, S.H., M.H** , yang telah memberikan bimbingan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. **Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM.** selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan **Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak pengetahuan dan didikan bagi Penulis.
7. **Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H.** selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat akademik serta bimbingan kepada Penulis.
8. Seluruh Pegawai dan Staff akademik Fakultas Hukum Unhas, khususnya **Pak Roni, Pak Usman, kak Tri, kak Bunga, Kak Nurdin, Om Baso, Pak Hakim, Pak Minggu** dan lain-lainnya atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Ketua Pengadilan Tinggi SulSelBar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh jajarannya, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian Penulis sehingga mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Go SH, untuk **Richard W. S. , Fantari,** dan **Syamsul Zainal S.** sebagai teman seperjuangan di hukum perdata
11. Keluarga Besar Tanoto Sholars Association, teman-teman MKU Kelas A dan seluruh teman angkatan PETITUM 2012, terima kasih untuk berbagai pengalaman yang berkesan.

12. Seluruh pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan perhatian dan dorongan moril yang sangat berharga kepada Penulis dalam menyelesaikan studi, yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan—kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis. Akhirnya kepada semua rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, Maret 2017

Bill Lukman Lo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Pengertian Tanggung Jawab.....	9
B. Tinjauan Tentang Direksi	12
1. Pengertian Direksi	12
2. Tugas dan Kewajiban Direksi	14
3. Tanggung Jawab Direksi	17
4. Prinsip Tanggung Jawab Direksi dalam Menjalankan Perseroan	 18
5. Kewenangan Direksi.....	21
C. Pemberian Kuasa.....	22
1. Dasar Hukum dan Pengertian Pemberian Kuasa ...	22
2. Bentuk Pemberian Kuasa	24
3. Jenis-Jenis Pemberian Kuasa	26
4. Kewajiban Penerima dan Pemberi Kuasa	27

	5. Berakhirnya Pemberian Kuasa	28
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
	A. Tipe Penelitian.....	32
	B. Pendekatan Penelitian.....	32
	C. Bahan Hukum.....	33
	D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Posisi Kasus	36
	B. Bentuk Tanggung Jawab Direksi dalam Pemberian Kuasa	48
	C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Direksi Selaku Pemberi Kuasa	64
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap orang sejak dilahirkan, adalah subjek hukum, yakni suatu *persona standi in judicio*, dengan pengertian bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajibannya sendiri. Bahkan janin yang masih berada dalam kandunganpun adakalanya sudah dianggap sebagai subjek hukum apabila ada keadaan atau kondisi tertentu, misalnya dalam pembagian warisan. Walaupun demikian tidaklah berarti setiap orang dianggap mampu melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala akibat dari suatu perbuatan hukum.¹ Misalnya, bagi anak yang dinyatakan belum dewasa menurut hukum, diperlukan peran orang tua dalam mewakili anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum. Bagi mereka yang berada di bawah pengampuan, diperlukan penunjukan seorang pengampu / kurator dalam melakukan perbuatan hukum.² Dengan demikian, orang tua maupun kurator yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilinya dalam segala tindakan pengurusan kepentingan hukumnya dan konsekwensinya adalah apabila ada akibat hukum dari pengurusan kepentingan tersebut maka dibebankan kepada orang tua atau kurator yang bersangkutan.

Memasuki dunia perdagangan yang berkembang dengan pesat dan menuntut adanya penyelesaian pekerjaan yang ekstra cepat, sering

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 129.

² Pasal 229 HIR.

membuat orang tidak mampu sendiri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau kepentingan-kepentingannya. Adanya kesibukan yang sedemikian rupa, kadangkala membuat seseorang sangat sulit untuk meluangkan waktu untuk mengurus secara langsung segala sesuatu yang penting, seperti menyediakan atau mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atau kepentingan-kepentingan tersebut dengan cara memberikan sebagian kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya kepada orang lain tersebut untuk menyelesaikan kepentingan atas namanya. Hal ini dikenal dengan istilah pemberian kuasa.

Dalam hukum perusahaan, pemberian kuasa diperbolehkan bagi seorang direksi perusahaan. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) yang menentukan bahwa “direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”. Adapun surat kuasa yang dimaksudkan dalam Pasal 103 UUPT tersebut adalah surat kuasa khusus.

Pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna menyelenggarakan urusan-urusan untuk dan “atas nama” si pemberi

kuasa.³ Menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu “perbuatan hukum” yaitu suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.⁴

Penggunaan surat kuasa dewasa ini sudah sangat umum di tengah masyarakat dalam berbagai keperluan. Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia telah diakui eksistensinya dan diatur dalam Buku III BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) pada bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata.

Dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, Direksi merupakan salah satu organ perusahaan selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan atau pegoperasian dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi juga memiliki kewenangan dalam mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar.⁵

Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas tugas pengurusan, juga dituntut adanya tanggung jawab secara pribadi apabila direksi lalai dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, terdapat pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menentukan bahwa :

³ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 306.

⁴ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 40.

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang dialami oleh perseroan apabila :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Terkait pemberian kuasa yang dilakukan oleh direksi, dalam UUPT tampaknya tidak memberikan pengaturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hubungan direksi selaku pemberi kuasa dengan pihak penerima kuasa adalah hubungan pemberian kuasa yang tunduk pada Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara. Segala akibat dari perbuatan penerima kuasa mengikat direksi sepanjang perbuatan tersebut yang dikuasakan. Hal ini sama dengan hubungan hukum dari pemberi kuasa dengan penerima kuasa dimana segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa sepanjang masih termasuk tindakan yang dikuasakan, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.⁶ Apabila penerima kuasa melakukan tindakan-tindakan diluar kekuasaan yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka akibat dari tindakannya tersebut

⁶ Pasal 1797 KUHPerdara.

merupakan tanggung jawab penerima kuasa secara pribadi. Akan tetapi dalam kenyataannya penerima kuasa yang melakukan hal-hal yang melampaui batas kuasanya ternyata tidak hanya menjadi tanggungjawab penerima kuasa, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS/KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012, Muhammad Ruslan, selaku direksi PT. Multi Sao Prima (pemberi kuasa) menunjuk Andi Makkarau Mapangara (penerima kuasa) untuk mengerjakan proyek pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium pada Akademi Pariwisata (AKPAR) Makassar. Pemberian kuasa tersebut berdasarkan surat kuasa tertulis pada tanggal 5 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Muis, S.H.,M.Kn.

Adapun salah satu tugas yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut adalah penerima kuasa wajib mengadakan, mengajukan, mengikuti penawaran-penawaran, tender-tender dan menandatangani kontrak-kontrak (perjanjian-perjanjian) kepada pihak lain menurut syarat-syarat perjanjian yang dianggap baik oleh yang dikuasakan.

Dalam proses pelelangan pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium pada Akademi Pariwisata (AKPAR) Makassar tersebut, Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa, telah membuat suatu

rekayasa dengan mengajukan penawaran yang lebih rendah dibandingkan dengan penawaran yang diajukan oleh perusahaan peserta lainnya, dimana harga yang diajukan relatif lebih murah meskipun spesifikasi barang yang diberikan adalah sama. Akibatnya maka PT. Multi Sao Prima dianggap sebagai pemenang lelang pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium tersebut.

Berdasarkan kontrak No. 072/KU.103/III/AKPAR-09 tanggal 6 Maret 2009 yang dibuat diantara AKPAR dengan PT. Multi Sao Prima disepakati bahwa masa pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 6 Maret sampai dengan 5 Juli 2009, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah). Dalam pengadaan salah satu jenis peralatan sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak adalah komputer dengan spesifikasi *Intel Core 2 Duo* untuk Laboratorium Fidelio. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan, komputer PC Laboratorium Fidelio ditemukan hanyalah *Intel Atom*, dimana barang yang dimasukkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang akan berpengaruh dari segi fungsi yakni kecepatan dan harga sehingga terjadi kemahalan. Adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi yang seharusnya diadakan dengan spesifikasi yang ada, maka menimbulkan selisih harga yang dipandang menjadi keuntungan yang tidak wajar. Akibat perbuatan Andi Makkarau Mapangara, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 133.466.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Maret 2012 Nomor 36/Pid.Sus/2011/PN.Mks yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 32/Pid.Sus.Kor/2012/PN.Mks tanggal 13 Juli 2012, Muhammad Ruslan, selaku direksi PT. Multi Sao Prima diputuskan bersalah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara sehingga dijadikan Terdakwa dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50 Juta,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan Pengadilan Negeri Makasar ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar ditingkat banding.

Apabila ditinjau dari konsekwensi pemberian kuasa, maka PT. Multi Sao Prima yang direksinya adalah Muhammad Ruslan wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh negara sedangkan adapun perbuatan pidana yang dilakukan oleh Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa adalah tanggung jawab pribadinya bukan tanggung jawab dari Muhammad Ruslan selaku direksi PT. Multi Sao Prima karena dalam perjanjian pemberian kuasa sama sekali tidak menguasakan kepada Andi Makkarau Mapangara untuk melakukan kecurangan dalam mengikuti pelelangan pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab direksi dalam pemberian kuasa ?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap direksi selaku pemberi kuasa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab direksi dalam pemberian surat kuasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap direksi selaku pemberi kuasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini dapat bermanfaat sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup ilmu Hukum Perusahaan khususnya mengenai Tanggung Jawab Direksi dalam pemberian kuasa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada organ Perusahaan Terbatas khususnya direksi Perusahaan agar dalam memberi kuasa harus tetap memperhatikan hal-hal yang dilakukan oleh penerima kuasa agar dapat terhindar dari akibat perbuatan Penerima Kuasa yang tidak diinginkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan⁷ atau kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain⁸. Sedangkan dalam Kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya”.⁹

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.¹⁰

Ridwan Halim dan Khairunnisa mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹¹

⁷ <http://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses tanggal 23-6-2016.

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, hlm. 619

⁹ Zulkifly dan Jimmy, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm. 369.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dina Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Direksi*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 4

Selanjutnya, Purbacaraka berpendapat bahwa :

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya harus tetap disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹²

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori :¹³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat sudah harus melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

¹² Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 37.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 503.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Selanjutnya, Djojodirjo berpendapat bahwa :

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya, dimana manusia merasa atau menyadari bahwa akibat baik atau buruk

¹⁴ Djojodirjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 53.

perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan keadilan atau pengorbanan.

B. Tinjauan tentang Direksi

1. Pengertian Direksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, direksi diartikan sebagai “(dewan) pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan, bank, yayasan dan sebagainya”.¹⁵ atau pengurus atau pimpinan perusahaan (bank, yayasan, dsb).¹⁶ Dalam kamus hukum, “direksi adalah anggota pengurus dari sesuatu Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki gelar direktur”.¹⁷ . Adapun pengertian direksi dalam Pasal 1 angka (5) UUPT adalah sebagai berikut :

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Selanjutnya, Pasal 93 ayat (1) UUPT mengatur mengenai syarat pengangkatan direksi adalah sebagai berikut :

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

¹⁵ <http://kbbi.web.id/direksi>, diakses tanggal 23-6-2016.

¹⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, hlm. 207.

¹⁷ Zulkifli dan Jimmy, 2012, Op.Cit.hlm. 142.

Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ dalam perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris. Sedangkan dewan komisaris adalah organ dalam perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi.¹⁸

Untuk pertama kalinya, pengangkatan Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan ia dapat diangkat kembali. Tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar.¹⁹ Terkait dengan masa jabatan direksi, Yahya Harahap berpendapat bahwa syarat pengangkatan anggota direksi terbatas untuk jangka waktu tertentu, bisa 5 sampai 10 tahun, tidak menjadi masalah berapa jangka waktunya, yang disyaratkan harus dengan jangka waktu, dan dilarang tanpa batas waktu. Apabila masa jabatan atau pengangkatannya berakhir, tidak dengan sendirinya direksi itu dapat meneruskan jabatannya semula untuk periode selanjutnya. Untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya, harus berdasarkan keputusan RUPS.²⁰

¹⁸ Pasal 1 angka 6 UUPT.

¹⁹ Pasal 94 UUPT.

²⁰ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 360.

2. Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi memiliki tugas dan kewajiban yang kesemuanya harus dilaksanakan dengan baik. Apabila direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya maka direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi atas akibat atau kerugian perseroan yang ditimbulkan.²¹

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UUPT, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Selain tugas pengurusan maka direksi juga mempunyai tugas perwakilan, yakni yang ditetapkan dalam Pasal 98 ayat 1 UUPT bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT atau anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Direksi yang berwenang mewakili perseroan melakukan perbuatan-perbuatan yang harus dijalankan untuk dan atas nama perseroan, baik untuk tindakan intern maupun untuk tindakan ekstern terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 97 UUPT ditetapkan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 UUPT

²¹ Pasal 97 ayat (3) UUPT.

tersebut maka direksi dalam menjalankan kegiatan dan membuat keputusan harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau mengatas namakan perseroan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi.

Direksi dalam mengurus perseroan, tidak dibolehkan melakukan kegiatan yang meskipun demi kepentingan perseroan akan tetapi tidak sesuai dengan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Apabila dalam anggaran dasar perseroan, ditetapkan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan pengangkutan dan treveling, ternyata direksi juga melakukan kegiatan percetakan maka meskipun kegiatan percetakan ini demi kepentingan perseroan dan menguntungkan perseroan akan tetapi melanggar Pasal 92 ayat (1) UUPT karena direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UUPT ditetapkan bahwa direksi perseroan bisa terdiri atas 1 orang direksi atau lebih, selanjutnya pada ayat 5 pasal tersebut ditetapkan bahwa dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Apabila dalam RUPS tidak melakukan pembagian tersebut, maka direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan sudah sewajarnya

penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Menurut teori, pengertian pengurusan yang dipercayakan kepada Direksi, dapat dibedakan atas ²²:

- perbuatan *beheren*, diterjemahkan sebagai perbuatan pengurusan (dalam arti sempit);

Perbuatan ini merupakan wewenang murni dari Direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari (kontinyu). Sepanjang perbuatan tersebut merupakan perbuatan pengurusan, maka Direksi berwenang menyelenggarakan sendiri.

- perbuatan *beschikking* atau perbuatan *van eigendom*, diterjemahkan sebagai perbuatan "kepemilikan" (dalam arti luas)

Perbuatan ini bukan merupakan perbuatan sehari-hari melainkan perbuatan khusus/istimewa, dan bukan murni wewenang Direksi. Untuk melakukan perbuatan ini, Direksi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan lainnya, misalnya Dewan komisaris atau RUPS.

Perbedaan perbuatan *beheren* dengan perbuatan *beschikking* dalam suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang real estate. Perbuatan menjual bangunan/rumah merupakan perbuatan *beheren* sedangkan apabila perseroan tersebut membutuhkan dana tambahan yang kemudian diperoleh dari bank maka perbuatan menjaminkan harta perseroan kepada bank itu adalah termasuk perbuatan *beschikking*

²² Rudhi Prasetya, 2014, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19-20

karena Direksi dalam menjaminkan harta perseroan harus ada persetujuan dari komisaris terlebih dahulu, Direksi tidak berhak bertindak sendiri secara langsung.

3. Tanggung jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi menjalankan pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kebijakan yang dipandang tepat berdasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha serta dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar. Pengelolaan perseroan ini juga wajib dijalankan Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Apabila Direktur ada lebih dari satu orang dan diantara mereka sudah ditentukan pembagian tugasnya, namun menurut undang-undang, mereka kesemuanya bertanggung jawab secara kolegal secara bersama. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan jika kerugian akibat kesalahan atau kelalaian diakibatkan oleh lebih dari seorang direktur maka tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPM mengatur bahwa :

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila direksi dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Karena tanggung jawab direksi merupakan tanggung jawab dengan tingkat yang sangat tinggi (*high degree*), dimana direksi tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan, maka direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 3 (tiga) prinsip, yaitu kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), prinsip yang menunjukkan kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill and care*), dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*). Oleh karena itu direksi dituntut untuk selalu bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.²³

4. Prinsip Tanggung Jawab Direksi dalam Menjalankan Perseroan

a. *Fiduciary Duties*

²³ Dhaniswara K. Harjono, 2008, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pustaka Pengembangan Hukum dan Bisnis, Jakarta, hlm. 331.

Fiduciary duties diartikan sebagai bahwa tugas yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*, sehingga Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan, itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi. Direksi tidak hanya bertanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan.²⁴

b. Corporate Opportunity

Corporate opportunity merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa seorang direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu. Dengan demikian, manakala tindakan tersebut merupakan kesempatan (*opportunity*) bagi perseroan dalam menjalankan bisnisnya, direksi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya.²⁵

²⁴ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81-82.

²⁵ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 224.

c. *Piercing the Corporate Veil*

Doktrin *piercing the corporate veil* ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset para *shareholders* atau *owners*.²⁶

Dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT merupakan penerapan dari *Piercing the corporate veil* yang pada intinya mengatur bahwa menyatakan :setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan.

d. *Ultra Vires*

Ultra vires atau Pelampauan Kewenangan Perseroan adalah suatu tindakan direksi yang melampaui atau melebihi batas kewenangan yang diberikan sebagaimana yang disebutkan dalam maksud dan tujuan pada anggaran dasar perseroan.²⁷ Jika ternyata sebuah perusahaan melalui organ perusahaan melakukan perbuatan diluar kewenangan atau melampaui kewenangan bidang usaha yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* dan menjadi batal demi hukum (*null and void*). Direktur yang

²⁶ Munir Fuady, op.cit hlm. 87-88

²⁷ Munir Fuady, op.cit hlm. 89-90

melakukan tindakan tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi. Suatu perbuatan hukum anggota direksi dikatakan bersifat *ultra vires* apabila perbuatan hukum itu berada di luar batas kewenangannya adalah tidak sah dan tidak mengikat PT dengan pihak ketiga kepada siapa perbuatan hukum itu dilakukan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab anggota direksi yang bersangkutan kepada pihak ketiga.²⁸

5. Kewenangan Direksi

Direksi merupakan salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan. Direksi mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan RUPS.²⁹

Berdasarkan Pasal 99 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili perseroan bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

²⁸ Tri widiyono, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm, 45.

²⁹ Pasal 98 ayat (2) UUPT.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka perseroan dapat diwakili oleh :³⁰

1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

C. Pemberian Kuasa

1. Dasar Hukum dan Pengertian Pemberian Kuasa

Ketentuan pemberian kuasa diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 *BW* hingga Pasal 1819 *BW*. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 *BW*, bahwa :

Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan

Dari rumusan pasal tersebut dapat kita lihat bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah :

³⁰ Pasal 99 ayat (2) UUPT.

1. Persetujuan;
2. Memberikan kekuasaan kepada seorang lain, dalam hal ini disebut penerima kuasa; dan
3. Yang menerimanya, yakni penerima kuasa, yang menyelenggarakan suatu urusan untuk atas nama pemberi kuasa.

Unsur pertama, yaitu persetujuan haruslah dipenuhi, sebagaimana untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Pengertian sepakat ini adalah suatu pernyataan dan kehendak dari seseorang yang disetujui dan diterima oleh pihak yang akan melaksanakan pernyataan tersebut.

Unsur kedua, yaitu "memberikan kekuasaan kepada seorang lain, dalam hal ini disebut penerima kuasa". Ini berarti pihak pemberi kuasa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan suatu urusan yang kemudian kewenangannya tersebut dilimpahkan kepada penerima kuasa yang oleh penerima kuasa menyetujui untuk menerimanya.

Unsur ketiga, yang menerimanya, yakni penerima kuasa, yang menyelenggarakan suatu urusan untuk atas nama pemberi kuasa. Ini berarti pihak penerima kuasa dalam menyelenggarakan atau melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepadanya bukan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain, yaitu pihak pemberi kuasa.

Dalam pemberian kuasa, adakalanya berlangsung secara cuma-cuma atau gratis maksudnya penerima kuasa tidak diberikan bayaran atau

imbalan apapun atas kuasa yang dilakukan. Akan tetapi adakalanya penerima kuasa diberikan upah atau honor yang kadang ditentukan secara tegas dalam surat kuasanya. Jika besarnya imbalan atau upah/honor tidak ditentukan secara tegas dalam surat kuasa, maka berdasarkan Pasal 1794 *BW* ditetapkan besarnya imbalan atau honor/upahnya tersebut berdasarkan 3 cara, yaitu:

- a. 3 % dari segala pendapatan;
- b. 2 % dari segala pengeluaran;
- c. 1,5% dari jumlah uang yang mereka terima.

2. Bentuk Pemberian Kuasa

Berdasarkan Pasal 1793 *BW*, bentuk Pemberian Kuasa dapat dilakukan dengan cara :

- Tertulis, baik dengan akta notaris maupun dengan akta dibawah tangan atau dalam sepucuk surat.
- Lisan.

Sedangkan penerimaan Kuasa dapat dilakukan dengan cara :

- Tegas, baik secara tertulis maupun lisan
- diam-diam, dapat dilihat dari pelaksanaan kuasa oleh si penerima kuasa.

Berdasarkan Pasal 1868 *BW*, suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat

dimana akta dibuatnya. Berdasarkan pasal inilah maka Pemberian kuasa dalam akta otektik adalah pemberian kuasa yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang (notaris). Pemberian kuasa bentuk ini memiliki kekuatan pembuktian formil yang sempurna, terutama mengenai pembuktian atas penandatanganan para pihak. Sedangkan Pemberian kuasa dalam akta di bawah tangan adalah pemberian kuasa yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum yang berwenang (notaris).

Pemberian kuasa secara diam-diam adalah pemberian kuasa yang tidak tertulis hanya secara lisan, dan jika penerima kuasa telah melaksanakan apa yang dikuasakan untuk kepentingan pemberi kuasa maka ini berarti penerima kuasa telah menyetujui kuasa yang diberikan kepadanya dan pemberi kuasa telah menerima apa yang telah dilakukan oleh penerima kuasa.

Berdasarkan Pasal 1796 *BW*, Pemberian Kuasa harus dilakukan secara tegas untuk hal-hal dalam perjanjian jual beli benda tidak bergerak, perjanjian perdamaian, perjanjian jaminan dan perjanjian-perjanjian yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik / pemberi kuasa. Oleh karena itu apabila akan menggunakan surat kuasa dalam melakukan perjanjian-perjanjian tersebut diatas, maka dalam surat kuasa tersebut harus secara tegas disebutkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa.

3. Jenis-Jenis Pemberian Kuasa

Pasal 1795 KUHPdata mengatur bahwa “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”.

a. Kuasa Umum

Kuasa umum adalah pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, yang hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan untuk kepentingan pemberi kuasa. Dalam kuasa umum tidak ditentukan atau disebutkan perbuatan yang dapat dilakukan dengan tegas oleh penerima kuasa, sedangkan pada kuasa khusus ditentukan secara tegas dan detail perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa. Misalnya untuk perbuatan pengurusan, maka penerima kuasa mempunyai peluang untuk melakukan perbuatan yang dikuasakan sesuai dengan pengalamannya karena peluang tersebut memang diberikan dalam pemberian kuasa.

b. Kuasa Khusus

Kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang hanya meliputi pelaksanaan satu atau lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Perbuatan hukum/kepentingan dimaksud harus disebutkan/dirumuskan secara tegas dan detail/terperinci. Contohnya, kuasa memasang hipotek

atau membebankan hak tanggungan, kuasa untuk melakukan perdamaian, kuasa bagi Advokat dalam mewakili perkara.

Terkait pemberian kuasa oleh direksi, kuasa harus diberikan dalam bentuk kuasa khusus dengan menyebutkan secara rinci dan jelas segala kepentingan yang dikuasakan kepada si penerima kuasa.³¹

4. Kewajiban Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa

a. Kewajiban Penerima Kuasa

Kewajiban-kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1800 *BW* sampai Pasal 1806 *BW*. Adapun yang menjadi kewajiban pemberi kuasa tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
2. Menyelesaikan semua urusan atau perbuatan hukum yang dilimpahkan kepadanya sebelum jangka waktu perjanjian kuasa berakhir.
3. Kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang tindakan apa saja yang dilakukannya, serta memberi perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang diterimanya.³²
4. Bertanggung jawab atas tindakan yang dibuat orang yang ditunjuknya, padahal kepadanya tidak diberi hak substitusi, atau kepadanya diberi hak substitusi tanpa menyebut namanya, dan ternyata orang yang ditunjuknya tidak cakap dan tidak mampu.³³

³¹ Pasal 103 UUPT No.40 Tahun 2007

³² Pasal 1802 KUHPerdata.

³³ Pasal 1803 KUHPerdata.

5. Penerima kuasa wajib menanggung segala kerugian dan bunga yang timbul atas keingkaran dan kelalaiannya melaksanakan apa yang dikuasakan kepadanya.

Selain pengaturan mengenai kewajiban Penerima Kuasa maka dalam Pasal 1979 *BW* menetapkan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya dan dalam Pasal 1801 alinea pertama *BW* juga menetapkan bahwa penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

b. Kewajiban Pemberi Kuasa

Kewajiban pemberi kuasa diatur pada Pasal 1807 *BW* sampai Pasal 1810 *BW*. Adapun yang menjadi kewajiban pemberi kuasa adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;
2. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;
3. Membayar upah kepada penerima kuasa;
4. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya;
5. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut.

5. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 *BW* sampai dengan Pasal 1819 *BW*. Berdasarkan Pasal 1813 *BW* suatu pemberian kuasa dapat berakhir karena :

- a. Ditarik kembali kuasanya oleh Pemberi Kuasa;
- b. Adanya pemberitahuan penghentian Kuasa oleh Pemberi Kuasa;
- c. Meninggalnya Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa ;
- d. Pailitnya Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa ;
- e. Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa ditaruh dibawah pengampuan.

Selain alasan yang diatur dalam Pasal 1813 *BW* tersebut maka Pemberi Kuasa berhak menarik kembali kuasanya jika dikehendaki dan ada alasan untuk itu serta memaksa Penerima Kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.³⁴ Untuk Penarikan Kuasa yang hanya diberikan kepada Penerima Kuasa tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan penerima kuasa karena belum mengetahui bahwa penerima kuasa telah dicabut hak kuasanya. Dalam hal ini Pemberi Kuasa masih berhak menuntut Penerima Kuasa.³⁵

Apabila Pemberi kuasa mengangkat kuasa baru untuk menjalankan hal yang sama dengan kuasa lama, maka ini akan berakibat ditariknya kuasa lama terhitung sejak tanggal pemberitahuan kepada Penerima Kuasa baru tersebut.³⁶

³⁴ Pasal 1814 KUHPerdata

³⁵ Pasal 1815 KUHPerdata

³⁶ Pasal 1816 KUHPerdata

Penerima Kuasa dapat memberhentikan / membebaskan dirinya sebagai kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasa ke Pemberi Kuasa. Apabila pemberitahuan penghentian ini dilakukan tanpa mengindahkan waktu, ataupun karena sesuatu hal lain karena salahnya Penerima Kuasa sehingga mengakibatkan Pemberi Kuasa rugi maka Penerima kuasa harus membayar ganti rugi kepada Pemberi kuasa kecuali jika Penerima Kuasa melanjutkan kuasa tersebut akan mengakibatkan kerugian besar bagi Pemberi Kuasa.³⁷ Apabila Penerima Kuasa tidak mengetahui Pemberi Kuasa telah meninggal dunia atau adanya sebab lain yang dapat mengakhiri pemberian kuasa maka apa yang telah dilakukan oleh penerima kuasa dalam keadaan tidak tahunya itu tetap sah dan segala perikatan yang telah dibuat oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dipenuhi oleh pemberi kuasa atau ahli warisnya.³⁸ Ahli waris Pemberi kuasa wajib memberitahu kepada Penerima Kuasa tentang kematian pemberi kuasa jika para ahli waris mengetahui adanya pemberian kuasa dan sementara itu mengambil tindakan yang perlu menurut keadaan bagi kepentingan si pemberi kuasa atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu.

Herlien Budiono berpendapat bahwa kuasa berakhir karena³⁹ :

³⁷ Pasal 1817 KUHPerdara

³⁸ Pasal 1818 KUHPerdara

³⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm.423

1. Selesainya tugas yang telah diberikan kepada penerima kuasa.
Kuasa untuk membeli sebuah mobil akan berakhir dengan dibelinya mobil yang dimaksud.
2. Perbuatan hukum untuk mana kuasa diberikan tidak mungkin dilaksanakan. Kuasa untuk membeli buku pada suatu lelang dan ternyata buku yang dimaksud telah terjual.
3. Jangka waktu kuasa telah lewat. Kuasa diberikan untuk 1 tahun, maka dengan lewatnya 1 tahun tersebut kuasa akan berakhir.
4. Meninggalnya pemberi atau penerima kuasa.
5. Dicabutnya kuasa atau penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa.

Berdasarkan Pasal 3:72 *NBW* juga mengatur berakhirnya kuasa (*volmacht*) karena dua hal sebagai berikut :

1. Ditempatkan di bawah *curatele* atau jatuh pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa.
2. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa kepada pemberi kuasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu tipe penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif (*legal research*).⁴⁰ Dalam hal ini penulis akan bertitik tolak pada beberapa peraturan perundang-undangan dan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum untuk mengkaji permasalahan yang diteliti yaitu dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS.KOR/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 47.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah kasus tanggung jawab direksi dalam penerbitan surat kuasa dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS. KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012.
3. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mencari konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dikaji jika konsep tersebut tidak terdapat dalam perundang-undangan. Konsep-konsep tersebut diteliti dari pendapat ahli hukum (doktrin hukum). Pendekatan konseptual ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam makna atau konstruksi hukum yang ada dalam perundang-undangan.

C. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 hingga Pasal 1819 BW mengenai Pemberian Kuasa dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil penelitian, dokumentasi kajian-kajian, kamus hukum maupun artikel-artikel hukum yang dipublikasikan di internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terkait dengan pembahasan ini.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dilakukan dengan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Bahan-bahan yang telah diperoleh, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, akan dianalisis dengan metode deksriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis yang selanjutnya akan memberikan gambaran atau pemaparan atas penelitian sebagaimana penelitian telah dilakukan yakni terkait “Tanggung Jawab Direksi Dalam Pemberian Kuasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS. KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012)”

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Menilai bentuk dan tanggung jawab direksi dalam pemberian kuasa dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012 dibutuhkan terlebih dahulu paparan mengenai duduk perkara yang dipermasalahkan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis, dimana selanjutnya dapat dipahami alasan hukum (*legal reason*) dari pertimbangan hakim tersebut.

Dalam perkara ini, yang duduk sebagai Terdakwa adalah Muhammmad Ruslan, SE bertempat tinggal di Kompleks Sao Asri, Blok M No.5, Kota Makassar, berkedudukan sebagai direktur PT Multi Sao Prima yang merupakan pemberi kuasa kepada Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa untuk mengerjakan proyek pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium di Akademi Parawisata Makassar.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 tanggal 31 Desember 2008 yang bersumber dari APBN, Akademi Pariwisata Makassar mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor yang meliputi kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium dengan

anggaran sebesar Rp. 1.388.810.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Berkenaan dengan hal tersebut, maka panitia pengadaan barang melakukan kegiatan pelelangan peralatan pendidikan Laboratorium Akademi Pariwisata Makassar No. 03/KU.103/XII/AKPAR-2008 yang mulai dibuka pada tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan 14 Januari 2009. Dalam rentan waktu tersebut, terdapat 6 perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan berdasarkan berita acara No. 005A/PL/PBJ/I/AKPAR-09 sebagai berikut :

No.	NAMA	PERUSAHAAN
1.	Andi Makkarau. M	PT. Multi Media Grafika
2.	Muh. Ruslan,S.E.	PT. Multi Sao Prima
3.	ABD. Razak Nurdin, S.E.	CV. Perkasa Sejati
4.	Adil. H.	PT. Multi Sao Asri
5.	H. Natsir Muhammad, S.E., MM.	CV. Sumber Abadi
6.	Ir. Novita	CV. Faarul

Setelah menjalani proses pelelangan maka akhirnya penawaran PT. Multi Sao Prima sebesar Rp. 1.040.000.000,- yang ditetapkan menjadi pemenang lelang pengadaan peralatan pendidikan laboratorium AKPAR dalah PT. Multi Sao Prima.

Dalam kegiatan pelelangan tersebut, Muhammad Ruslan, SE selaku direktur dari PT. Multi Sao Prima memberikan kuasa kepada Andi Makkarau Mapangara berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Maret 2009,

yang dibuat di hadapan notaris Abdul Muis untuk mewakili dirinya dalam mengerjakan proyek pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium di Akademi Pariwisata Makassar.

Adapun hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam surat kuasa yang dibuat antara Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa dengan Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa meliputi perbuatan-perbuatan untuk melakukan hal-hal tertentu, yakni :

- a. Mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan baik teknik maupun administrasi khusus Proyek Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Laboratorium Akademi Pariwisata Makassar.
- b. Memimpin organisasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut.
- c. Membeli (membayar) dan menerima barang serta peralatan-peralatan yang diperlukan, menerima dan membayar gaji buruh, mengusahakan pembiayaan keuangan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut sampai selesai dan diterima dengan baik oleh pemberi pekerjaan.
- d. Membuat, menyuruh membuat berita acara pekerjaan dan menerima pembayaran, mencairkan termin-termin dari pembayaran pekerjaan, menandatangani kuitansi-kuitansi tanda penerimaannya yang sah.
- e. Mengurus segala urusan mengenai izin lisensi dan surat-surat yang diperlukan untuk kelancaran proyek tersebut.

- f. Mengadakan, memajukan, mengikuti penawaran-penawaran, tender-tender, dan mendatangkan kontrak-kontrak kepada pihak lain menurut syarat-syarat perjanjian yang dianggap baik oleh yang dikuasakan.
- g. Melakukan penagihan-penagihan, menghadap pada pejabat pemerintah maupun swasta yang dianggap perlu dan menandatangani nota-nota, surat-surat atau segala sesuatu yang diperlukan untuk hal tersebut.
- h. Menerima surat-surat berharga, diantaranya pos wesel dan lain-lain, melakukan segala pembayaran yang diharuskan, memberi kuitansi untuk segala pembayaram, menerima segala surat, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, paket-paket, kawat-kawat, dan untuk keperluan untuk itu menandatangani dan menyerahkan segala surat tanda terima, membuka surat-surat dan melakukan tulis menulis yang berhubungan dengan hal tersebut.
- i. Mengurus segala hal yang bersangkutan dengan pajak-pajak, memasukkan surat-surat pemberitahuan, surat-surat keberatan terhadap penetapannya, membayar pajaknya dan menerima kembali yang kelebihannya dibayar, dan menyelesaikan segala temuan-temuan yang berhubungan dengan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya.
- j. Mengajukan tuntutan-tuntutan dihadapan pengadilan agar pejabat-pejabat lainnya guna membela kepentingan perseroan dan

selanjutnya mengerjakan segala sesuatu sehubungan dengan hal-hal tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- k. Untuk segala keperluan dan pelaksanaan kuasa-kuasa tersebut di atas, penerima kuasa berhak untuk menghadap dimana perlu, memberikan dan menerima keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat serta mendatangi semua surat-surat yang diperlukan serta pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna oleh penerima kuasa dengan kesanggupan dari pemberi kuasa untuk mengesahkan semua perbuatan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh penerima kuasa dalam batas-batas kekuasaan ini, satu dan lain dengan memerhatikan peraturan-peraturan dari yang berwenang, dengan demikian ketentuan bahwa segala keuntungan, pendapatan, risiko, kerugian, dan akibat hukum yang timbul seluruhnya menjadi hak dan tanggung jawab penerima kuasa.

Pada bagian akhir surat kuasa tersebut dinyatakan secara tertulis bahwa kuasa yang diberikan hanya dapat digunakan untuk keperluan sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang tidak ditentukan jangka waktu berlakunya.

Berdasarkan akta notaris Nomor 28, Tanggal 7 September 1994, Sri Hartini Widjaja, pendirian PT. Multi Sao Prima, disebutkan bahwa Muhammad Ruslan selaku direktur PT. Multi Sao Prima mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 11, yang pada pokoknya adalah :

- a) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b) Setiap anggota direksi wajib menjalankan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
- c) Direksi berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- d) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

Pada tanggal 6 Maret 2009, dibuatlah kontrak No. 072/KU.103/III/AKPAR-09 antara Akademi Pariwisata Makassar dengan PT. Multi Sao Prima, di mana telah disepakati bahwa masa pelaksanaan kegiatan adalah selama 4 bulan sejak tanggal 6 Maret s/d 5 Juli 2009. Kontrak tersebut kemudian ditandatangani oleh Abdu Rahman selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Muhammad Ruslan, SE selaku direktur PT. Multi Sao Prima. Muhammad Ruslan, SE selaku direktur PT. Multi Sao Prima masih menandatangani kontrak No. 072/KU.103/III/AKPAR-09 dan menerima pembayaran kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium pada AKPAR Makassar, sementara telah diketahui bahwa sejak tanggal 5 Maret 2009, Muhammad Ruslan, SE telah memberikan kuasa kepada Andi Makkarau Mapangara untuk melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium pada AKPAR

Makassar sehingga Muhammad Ruslan, SE tidak mempunyai lagi hak untuk menerima pembayaran dari kegiatan yang bersangkutan.

Setelah kegiatan pengadaan barang dilakukan, baru diketahui bahwa barang yang dimasukkan oleh rekanan PT. Multi Sao Prima yang diwakili oleh Andi Makkarau Mapangara ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi serta nilai/harga sebagaimana dokumen penawaran yang diajukan oleh penyedia barang/rekanan, sehingga terjadi kemahalan/penggelembungan harga yang diajukan oleh Andi Makkarau Mapangara yang kemudian diketahui oleh Abdu Rahman selaku PPK, namun ia tetap menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan harga sehingga terjadi kemahalan.

Berdasarkan keterangan dari panitia penerima barang yang mengatakan spesifikasi komputer untuk PC Laboratorium Fidelio berdasarkan kontrak adalah spesifikasi Inter Core 2 Duo, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan komputer PC Laboratorium Fidelio yang ditemukan hanya ada Intel Atom, sehingga terdapat perbedaan spesifikasi dan mempengaruhi dari segi fungsi yakni kecepatan dan harga. Adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi yang seharusnya diadakan dengan spesifikasi yang ada maka selisih harga yang ada menjadi keuntungan yang tidak wajar.

Hasil audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. LHAI-836/PW21/5/2011 tanggal 13 Juli 2011 menunjukkan adanya selisih harga sebesar Rp. 133.466.000,- (seratus tiga puluh tiga

juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Andi Makkarau Mapangara menimbulkan kerugian kepada negara.

Atas perbuatan Muhammad Ruslan, SE, jaksa mendakwanya dengan dakwaaan subsidaritas yang terdiri dari :

- dakwaan primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP
- dakwaan subsidaritas : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan

terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa :⁴¹

- PT Multi Sao Prima yang memenangkan pelelangan kegiatan pengadaan peralatan Pendidikan Laboratorium Akademi Pariwisata (Akpar) Mks No. 03.KU.103/XII/ AKPAR - 2008 yang mulai dibuka pada tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan 14 Januari 2009;
- Berdasarkan Surat Keputusan Abdu Rahman, SE, MSi, Ak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 068/ KU.103/II/AKPAR-2009 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium Akpar Makassar bahwa yang bertindak selaku penyedia barang atau rekanan adalah PT. Multi Sao Prima dgn Direktur Utama Ruslan, SE
- Berdasarkan Kontrak No. 072/KU.103/ III/ AKPAR-09 tanggal 06 Maret 2009 yg dibuat antara Akademi Pariwisata Makassar dgn PT. Multi Sao Prima disepakati bahwa masa pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan 05 Juli 2009. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Abdu Rahman, SE, MSi, AK selaku Pejabat Pembuat Komitmen yg disebut sbg PIHAK PERTAMA dan Muhammad Ruslan, S.E. selaku Direktur PT. Multi Sao Prima yang disebut sebagai PIHAK KEDUA .
- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan ini, Muhammad Ruslan, SE selaku direktur PT. Multi Sao Prima (pihak rekanan) telah memberi

⁴¹ Ringkasan dari Fakta Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012.

kuasa kepada Saksi Andi Makkarau Mapangara selaku kuasa direksi berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Muis. Kuasa ini hanya diberikan untuk keperluan tersebut diatas untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

- Namun Muhammad Ruslan, S.E. pada tgl 6 Maret 2009 masih menandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 072/KU.103/III/ AKPAR-09, dan menerima pembayaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Laboratorium pada Akademi Pariwisata. Sedangkan diketahui sejak tanggal 5 Maret 2009 Muhammad Ruslan, S.E. selaku Direktur PT. Multi Sao Prima sudah tidak berwenang lagi melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium pada Akademi Pariwisata Makassar yang menggunakan Anggaran APBN tahun 2009 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kontrak No.: 072/KU.103/III/ AKPAR-09, dan tidak mempunyai hak lagi untuk menerima pembayaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Laboratorium pada Akademi Pariwisata Makassar.
- Barang yang dimasukkan oleh Rekanan PT. Multi Sao Prima yang diwakili oleh Terdakwa atau Penyedia Barang yang telah dikuasakan kepada Andi Makkarau Mapangara tidak sesuai dengan spesifikasi serta nilai/harga sebagaimana dokumen penawaran yang diajukan oleh Penyedia Barang/ Rekanan (yang dibuat oleh Andi Makkarau Mapangara), sehingga terjadi kemahalan/pengelembungan harga yang

dilakukan oleh Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa dari Terdakwa selaku Penyedia Barang atau Rekanan. Hal ini diketahui oleh saksi Abdu Rahman, SE, MSi, AK selaku Pejabat Pembuat Komitmen namun Penyedia Barang/Rekanan dalam hal Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa dari Terdakwa selaku Penyedia Barang a/ Rekanan ini tidak melakukan sesuatu agar barang yg tdk sesuai dgn spesifikasi dikembalikan atau diganti, dan saksi Abdu Rahman, SE, MSi AK selaku PPK tetap menerima barang yg tdk sesuai dengan spesifikasi dan yang tidak sesuai dengan harga sehingga terjadi kemahalan.

- Berdasarkan keterangan dari panitia penerima barang yang mengatakan Spesifikasi komputer untuk PC Lab. Fidelio berdasarkan kontrak dengan spesifikasi Intel Core 2 Duo setelah dilakukan pemeriksaan komputer PC Lab. Fidelio ditemukan hanya ada Intel Atom, perbedaan spesifikasi ini mempengaruhi dari segi fungsi yakni kecepatan dan harga. Adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi yang seharusnya diadakan dengan spesifikasi yang ada maka selisih harga yang ada menjadi keuntungan yang tidak wajar.
- Berdasarkan Audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil audit BPKP No. LHAI – 836/ PW 21/ 5/ 2011 tanggal 13 Juli 2011 bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Abdu Rahman SE, MSi, AK dan saksi Ir Andi

Makkarau Mapangara, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 133.466.000,-

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 07/Pid.B/2013/PN.Mks tanggal 27 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam dakwaan primair, tidak terbukti karena perbuatan Muhammad Ruslan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kedudukannya sebagai rekanan, maka perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, melainkan perbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik;
- b. Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang kemudian memutuskan bahwa dakwaan Subsidiar terbukti dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyetujui perbuatan saksi Andi Makkarau Mappangara, yang mengirimkan barang-barang yang spesifikasi dan harganya tidak sesuai dengan harga penawaran, sehingga dirinya mendapat keuntungan yang tidak wajar dan berdasarkan hasil audit Investigasi oleh BPKP Perwakilan Propinsi

Sulawesi Selatan No. LHA1 – 836/ PW 21/ 5/ 2011 tanggal 13 Juli 2011 bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Abdu Rahman SE, MSi, AK dan saksi Ir Andi Makkarau Mapangara, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 133.466.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Majelis juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ;

Berhubung merasa tidak puas dan tidak menerima terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012, maka Muhammad Ruslan, SE mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, dimana selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012 maka pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menguatkan kembali putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Muhammad Ruslan, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”.

B. Bentuk Tanggung Jawab Direksi dalam Pemberian Kuasa

Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki

kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah "organ perseroan" yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang organ-organ perseroan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas masih tetap berlaku meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPT, salah satu organ perseroan yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan/kepengurusan perseroan adalah direksi. Oleh karena itu keberadaan direksi bagi

perseroan sangatlah penting. Sekalipun perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dengan direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fiksi hukum, bahwa perseroan terbatas dianggap seakan-akan sebagai subjek hukum, sama seperti manusia.⁴²

Semakin besar peranan direksi dalam pengelolaan/kepengurusan perseroan, maka semakin besar pula tanggung jawab direksi dalam suatu perseroan yang dijalankannya. Dalam pengurusan, direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.⁴³ Pasal 97 ayat (3) UUPT mengatur bahwa pengurusan suatu perseroan juga tidak terlepas dari tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam menjalankan pengelolaan/kepengurusan perseroan terlekat adanya suatu tanggung jawab pribadi/privat pada diri direksi. Tanggung jawab privat/pribadi yang melekat pada diri direksi memberikan suatu konsekuensi bahwa dalam menjalankan tugas kepengurusannya direksi harus bekerja secara profesional dan berhati-hati.

Selain tanggung jawab direksi, diatur pula dalam UUPT beberapa hak direksi. Salah satu hak direksi adalah hak untuk mengangkat seorang kuasa apabila direksi yang bersangkutan berhalangan/mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan suatu urusan tertentu yang

⁴² Try Widiyono, 2005. Direksi Perseroan Terbatas : Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung jawab. Ghalia Indonesia, Bogor. Hal. 7.

⁴³ Pasal 97 ayat (1) UUPT.

berkaitan dengan perseroan. Pemberian kuasa oleh direksi merupakan suatu hal yang telah diatur dalam Pasal 103 UUPT bahwa “direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang telah memberikan kewenangan kepada direksi untuk menunjuk satu orang atau lebih karyawan ataupun orang lain dalam suatu bentuk kuasa tertulis untuk bertindak atas nama perseroan mewakili kepentingan direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Kata “tertentu” pada Pasal 103 UUPT menunjukkan bahwa kuasa yang diberikan hanya mencakup hal-hal tertentu yang secara tegas dan tertulis (*schriftelijke machtiging*) dinyatakan dalam surat kuasa.

Menurut penjelasan Pasal 103 UUPT, yang dimaksud dengan kuasa adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Kuasa khusus (*bizondere machtiging*) adalah pemberian kuasa yang hanya meliputi pelaksanaan satu/lebih kepentingan tertentu dari pemberi kuasa. Perbuatan hukum/kepentingan dimaksud harus disebutkan/dirumuskan secara tegas dan detail/terperinci.

Pengaturan mengenai surat kuasa juga diatur dalam Pasal 1792-1819 BW. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) telah memberikan suatu pengaturan yang jelas mengenai kewajiban dan

tanggung jawab dari pemberi dan penerima kuasa. Adapun salah satu tanggung jawab penerima kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1801 ayat (1) *BW* adalah bahwa penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Selanjutnya, mengenai tanggung jawab pemberi kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1811 *BW* menentukan bahwa jika seorang kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka adalah bertanggungjawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa tersebut.

Dari kedua pasal yang mengatur mengenai kewajiban penerima dan pemberi kuasa dapat diketahui bahwa penerima kuasa wajib bertanggungjawab atas kelalaian maupun kesengajaan akibat perbuatannya yang ditimbulkan dalam melaksanakan pemberian kuasa tersebut, dan pemberi kuasa juga wajib untuk bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa akibat pemberian kuasa tersebut sepanjang kuasa yang diberikan.

Dalam surat kuasa khusus, penerima kuasa hanya dapat melakukan satu kepentingan atau lebih sebagaimana telah ditegaskan dalam surat kuasa tersebut. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa apabila penerima kuasa melakukan hal-hal yang tidak dinyatakan secara jelas dalam surat kuasa, maka penerima kuasa wajib

bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan yang ditimbulkan akibat perbuatan melampaui batas pemberian kuasa yang ditentukan dalam surat kuasa yang diberikan. Ketentuan mengenai kuasa khusus juga ditegaskan dalam Pasal 123 ayat (1) *HIR* yang pada intinya menentukan bahwa jika dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan sebagaimana diatur dalam ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120 *HIR*, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat.

Melihat dari makna yang terkandung pada pasal tersebut, apabila ditinjau dari sudut pandang pengaturan pembuatan pemberian kuasa, surat kuasa khusus dalam format pasal ini sangatlah sederhana, hanya dengan memberikan judul khusus pada surat kuasa, kemudian dibuat dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 adapun persyaratan pembuatan surat kuasa khusus untuk menangani perkara, yaitu :

- a. Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- b. Menyebutkan tentang kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas; dan

- d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012, dimana Muhammad Ruslan, SE selaku direktur PT. Multi Sao Prima yang memberikan kuasa tertulis kepada Andi Makkarau untuk mengerjakan proyek pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium di Akademi Pariwisata Makassar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan direksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 103 UUPT.

Adapun pemberian kuasa yang diberikan oleh Muhammad Ruslan, SE kepada Andi Makkarau dinyatakan secara tertulis yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Muis pada tanggal 5 Maret 2009, dimana dalam surat kuasa tersebut juga menyebutkan secara rinci mengenai identitas para pihak dan hal-hal yang dikuasakan dan harus dilaksanakan oleh Andi Makkarau selaku penerima kuasa. Adapun objek pelaksanaan kuasa adalah proyek pengadaan peralatan pendidikan Laboratorium Akademi Pariwisata Makassar.

Penyebutan secara rinci dalam surat kuasa mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Andi Makkarau selaku penerima kuasa, menunjukkan bahwa kuasa yang diberikan oleh Muhammad Ruslan, SE adalah berbentuk kuasa khusus sebagaimana mestinya bentuk surat kuasa yang harus dibuat oleh direksi pada suatu perusahaan. Dengan

demikian, maka langkah hukum yang dilakukan oleh Muhammad Ruslan, SE telah memenuhi syarat formil pemberian kuasa oleh direksi terkait dengan perwakilan suatu kepentingan tertentu.

Pemberian kuasa ini adalah sah karena perbuatan yang dikuasakan adalah perbuatan pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium yang akan digunakan di Akademi Parawisata Makassar sehingga perbuatan ini tidak melanggar undang-undang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa direksi merupakan salah satu organ perseroan yang memegang peranan penting dalam menjalankan perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang disertai dengan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Terkait dengan rincian tugas direksi, dalam UUPT tidak diatur, tetapi hanya menyatakan bahwa pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi serta besar dan jenis penghasilan direksi ditetapkan oleh RUPS yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu untuk mengetahui rincian tugas direksi harus dilihat dalam anggaran dasar perseroan tersebut.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, berdasarkan akta notaris Nomor 28 Tanggal 7 September 1994, yang dibuat di hadapan Sri Hartini Widjaja, tentang pendirian PT. Multi Sao Prima, disebutkan bahwa Muhammad Ruslan, SE selaku direktur PT. Multi Sao

⁴⁴Agus Budiarto, 2009.Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Ghalia Indonesia, Bogor. Hal. 64.

Prima mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar, yang pada pokoknya adalah :

- a) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b) Setiap anggota direksi wajib menjalankan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
- c) Direksi berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- d) Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1) UUPT pada intinya menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) hal pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan. Dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan, setiap anggota direksi wajib bertanggung jawab melaksanakan kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dari kalimat tersebut, maka unsur pentingnya adalah : (1) kepentingan usaha perseroan, dan (2) itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, apabila tugas dan wewenang Muhammad Ruslan, SE sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Muhammad Ruslan, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama dengan Andi Makkarau Mapangara yang merupakan penerima kuasa, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam hal ini kurang tepat karena yang melaksanakan secara riil perbuatan yang dikuasakan adalah Andi Makkarau Mapangara. Perusahaan Muhammad Ruslan, SE selaku pihak pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan pendidikan Laboratorium Akademi Pariwisata Makassar telah memberikan kuasa kepada Andi Makkarau Mapangara untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut. Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa sudah pasti mengetahui pekerjaan pengadaan tersebut karena Muhammad Ruslan, SE :

- Sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Abdu Rahman, SE, MSi, Ak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 068/ KU.103/II/AKPAR-2009 tanggal 28 Februari 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium Akpar Makassar bahwa yang bertindak selaku penyedia barang atau rekanan adalah PT. Multi Sao Prima dgn Direktur Utama Muhammad Ruslan, SE.⁴⁵
- Sebagai pihak dalam Kontrak No. 072/KU.103/ III/ AKPAR-09 tanggal 06 Maret 2009 yg dibuat dengan Akademi Pariwisata Makassar yang disepakati bahwa masa pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan 05 Juli 2009.⁴⁶

⁴⁵ Putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012, hal.37

⁴⁶ Putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012., hal. 43

Muhammad Ruslan, SE selaku direksi PT. Multi Sao Prima yang memenangkan tender pengadaan peralatan tersebut mengetahui pekerjaan pengadaan tersebut akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan pengadaan adalah Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa dari Muhammad Ruslan, SE berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Maret 2009. Oleh karena itu, perbuatan Andi Makkarau Mapangara yang merugikan negara karena terjadi kemahalan menurut hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan No. LHA1 – 836/PW 21/ 5/ 2011 tanggal 13 Juli 2011, adalah tanggung jawab pribadi Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1801 alinea pertama *BW* karena Andi Makkarau Mapangara telah melakukan penyimpangan dari kuasa tersebut, yaitu menyerahkan barang atau peralatan pendidikan dan Laboratorium yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak sesuai dengan harga sehingga terjadi kemahalan, padahal berdasarkan Pasal 1979 *BW* perbuatan ini tidak diperbolehkan.

Muhammad Ruslan, SE selaku direktur PT. Multi Sao Prima (pihak rekanan) telah memberi kuasa kepada Saksi Andi Makkarau Mapangara untuk melakukan pekerjaan pengadaan ini karena Muhammad Ruslan, SE mengetahui bahwa penyusunan dokumen penawaran pelelangan dilakukan oleh Andi Makkarau Mapangara berdasarkan survey pasar dengan mengumpul brosur di toko-toko, hasil searching internet, dan harga Pasar kota Surabaya, memperhitungkan PPN dan PPH termasuk didalamnya biaya pemasangan serta biaya jasa. Penawaran pelelangan

yang diajukan inipun harganya masih dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Lelang. Yang menimbulkan permasalahan ketika Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa dalam melaksanakan pengadaan alat pendidikan dan laboratorium tersebut, menyerahkan barang / peralatan pendidikan dan Laboratorium yang tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi dalam dokumen penawaran pada saat ikut lelang pengadaan. Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa tidak mengetahui hal ini karena tidak pernah ada keberatan dari pihak Akademi Parawisata Makassar selaku pengguna barang ketika barang diterima olehnya. Demikian pula pada waktu Muhammad Ruslan, SE menanda tangani berita acara pembayaran juga tidak ada keluhan atau keberatan atas barang yang telah diterimanya sehingga pembayaran yang dilakukan secara bertahap masuk kerekening Muhammad Ruslan, SE tetap berjalan lancar.

Akibat dari perbuatan Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa Muhammad Ruslan, SE yang memasok barang tidak sesuai dengan dokumen penawaran sehingga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka berdasarkan Pasal ini 1797 BW dan Pasal 1801 alinea pertama BW ini merupakan tanggung jawab Andi Makkarau Mapangara secara pribadi selaku penerima kuasa. Dalam surat kuasa yang diberikan oleh Muhammad Ruslan, SE kepada Andi Makkarau Mapangara untuk melaksanakan pengadaan peralatan sesuai dengan apa yang telah ditawarkan dalam dokumen penawaran. Akan tetapi ketika

Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa melakukan penyimpangan yaitu memasukkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang ditawarkan dalam dokumen penawarannya maka itu adalah tanggung jawab pribadi dari Andi Makkarau Mapangara bukan tanggung jawab Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa. Perbuatan Andi Makkarau Mapangara memasukkan barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang ditawarkan dalam dokumen penawarannya sehingga terjadinya kemahalan dan negara dirugikan maka perbuatan Andi Makkarau Mapangara ini termasuk tindak pidana karena memenuhi semua unsur-unsur delik Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Moeljatno, *“orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”*⁴⁷

Perbuatan Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari kuasa yang diberikan Muhammad Ruslan, SE selaku direksi PT. Multi Sao Prima. Oleh karena itu menurut Pasal 1797 BW dan Pasal 1801 alinea pertama BW, yang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan Andi Makkarau Mapangara selaku

⁴⁷Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 20 sebagaimana mengutip dari Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana(Jakarta: Bina Aksara, 1987, 155

penerima kuasa adalah Andi Makkarau Mapangara pribadi bukan Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa. Pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada Muhammad Ruslan, SE apabila yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan. Asas kesalahan menyatakan dengan tegas, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*) merupakan dasar dari dipidanya si pembuat. Meskipun azas ini tidak tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya azas ini sudah tidak diragukan lagi. Hal ini nampak dalam ketentuan pidana di Indonesia selalu ada kata "barang siapa yang" ini menunjukkan bahwa yang akan dikenakan pasal pidana tersebut adalah pelakunya langsung, tidak dapat dikuasakan. Berdasarkan ketentuan demikian, penulis berpendapat bahwa Muhammad Ruslan, SE selaku direksi PT. Multi Sao Prima dalam menjalankan tugasnya tidak bisa dipidana akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan suatu perbuatan yang halal, yaitu mengadakan peralatan pendidikan dan laboratorium.

Pasal 97 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab penuh yang dilekatkan kepada direksi apabila ia bersalah ataupun lalai dalam menjalankan tugas kepengurusannya serta tidak melaksanakannya dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab. Namun hal ini mendapatkan pengecualian sebagaimana diatur Pasal 97 ayat (5) UUPT bahwa :

Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila ia dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dari ketentuan tersebut, penulis dapat berkesimpulan bahwa meskipun Muhammad Ruslan, SE selaku direksi dinyatakan lalai dalam menjalankan kepengurusannya, namun apabila ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak bersalah, maka secara *a contrario* Muhammad Ruslan, SE tidak wajib untuk bertanggung jawab penuh secara pidana.

Dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Muhammad Ruslan, SE selaku direksi PT. Multi Sao Prima, memberi kuasa kepada Andi Makkarau Mapangara untuk memasokkan/mengadakan peralatan pendidikan dan laboratorium, sama sekali tidak mengetahui bahwa peralatan yang dipasok oleh penerima kuasa, tidak sesuai dengan klasifikasi dalam dokumen penawaran. Karena kegiatan pengadaan barang tersebut dikerjakan sendiri oleh penerima kuasa. Demikian pula ketika tahapan pembayaran masuk rekening Muhammad Ruslan, SE.,

maka ini dianggap oleh Muhammad Ruslan, SE bahwa semua sudah berjalan semestinya sehingga telah dibayar secara bertahap hingga lunas.

Adapun kemudian terungkap bahwa barang yang diserahkan oleh Andi Makkarau Mapangara kepada pihak Akademi Parawisata Makassar tidak sesuai dengan dokumen penawaran sehingga terjadi kemahalan yang menimbulkan kerugian negara, itu sudah bukan tanggung jawab Muhammad Ruslan, SE, karena dalam surat kuasa sama sekali tidak menguasakan kepada Andi Makkarau Mapangara untuk melakukan perbuatan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Oleh karena itu perbuatan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa adalah merupakan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan yang dikuasakan oleh Muhammad Ruslan, SE. Berdasarkan ketentuan Pasal 1797 *BW*, bahwa penerima kuasa dilarang untuk melakukan perbuatan yang melampaui kuasanya dan Pasal 1801 *BW* mengatur “si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian dalam menjalankan kuasanya.” Ini berarti penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas kerugian maupun kelalaian yang ditimbulkan terhadap segala tindakan yang dengan lalai maupun sengaja dalam menjalankan kuasanya. Akibat yang terjadi dari perbuatan yang melampaui kuasanya atau penyimpangan kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tanggung jawab penerima kuasa sendiri, tidak

boleh melibatkan pemberi kuasa. Apabila Pemberi Kuasa juga dipidana akibat kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa yang melebihi atau menyimpang dari kuasa yang diberikan maka ini telah bertentangan dengan pasal-pasal tersebut diatas dan melanggar azas kesalahan yang menyatakan dengan tegas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*) yang merupakan dasar dipidannya si pembuat.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Direksi Selaku Pemberi Kuasa

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni pada Putusan Pengadilan Tinggi No. 32/PID. SUS.KOR/ 2012/PT.MKS tanggal 13 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012, hakim menjatuhkan sanksi terhadap Muhammad Ruslan, SE selaku direksi pada PT. Multi Sao Prima yang berupa sanksi pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Andi Makkarau selaku penerima kuasa yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dasar pertimbangan hakim dengan menjatuhkan sanksi pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi oleh Muhammad Ruslan, SE adalah karena Hakim berpendapat bahwa Muhammad Ruslan, SE menyetujui tindakan Andi Makkarau yang melakukan penggelembungan harga dalam pengadaan barang pada

Akademi Pariwisata Makassar, sehingga Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa itu dianggap terlibat juga, dimana selanjutnya mereka dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 133.466.000,-.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, antara lain :

1. Muhammad Ruslan, SE telah menandatangani berita acara serah terima barang yang dikirimkan Andi Makkarau Mapangara, dimana barang-barang tersebut sebagian spesifikasi dan harganya tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

Berita acara serah terima barang berisikan laporan mengenai segala jenis barang beserta spesifikasinya yang telah diserahkan dan diterima oleh panitia pengadaan barang dan dilakukan pembayaran yang dicocokkan dengan isi kontrak pengadaan barang tersebut. Dengan ditandatanganinya berita acara serah terima barang, menurut pandangan hakim berarti Muhammad Ruslan, SE secara tidak langsung menyetujui dan membenarkan bahwa barang yang disediakan oleh Andi Makkarau tersebut telah sesuai dengan isi kontrak, meskipun tidak dilakukannya pengecekan terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa dengan ditandatanganinya berita acara serah terima barang oleh Muhammad Ruslan, SE maka dalam hal ini Muhammad Ruslan, SE selaku direksi selanjutnya bertanggungjawab atas segala hal-hal yang

tertera dalam berita acara serah terima barang, khususnya terkait dengan kesesuaian spesifikasi barang-barang yang diserahkan dengan apa yang telah tertera di dalam kontrak. Adapun kemudian ternyata ada ketidaksesuaian spesifikasi peralatan yang diberikan bukan merupakan tanggung jawab dari Muhammad Ruslan, SE karena peralatan tersebut disediakan oleh Andi Makkarau Mapangara akan tetapi hakim menyatakan bahwa Muhammad Ruslan melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf e, bahwa perbuatan/tindakan penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab. Tidak ditemukannya tanggung jawab Muhammad Ruslan, SE oleh hakim dalam menjalankan kontrak pengadaan barang dan mengakibatkan kerugian negara yang dilakukan oleh Andi Makkarau selaku penerima kuasa maka hakim memutuskan bahwa Muhammad Ruslan, SE dipidana.

Berdasarkan putusan hakim ini, penulis berpendapat kurang tepat karena berdasarkan azas pembedaan, seseorang dapat dipidana apabila orang tersebut melakukan kesalahan. Dalam kasus ini ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa dan Andi Makkarau selaku penerima kuasa, antara lain :

- Muhammad Ruslan, SE selaku Direktur PT. Multi Sao Prima menandatangani kontrak pelaksanaan kegiatan Nomor 072/KU.103/ III/AKPAR-09 tanggal 06 Maret 2009 yang dibuat antara Akademi Pariwisata Makassar dengan PT. Multi Sao Prima;

Penandatanganan kontrak Nomor No. 072/KU.103/III/AKPAR-09 antara Akademi Pariwisata Makassar dengan PT. Multi Sao Prima yang dilakukan oleh direktur PT. Multi Sao Prima Muhammad Ruslan, SE, ini tidak bermasalah karena PT. Multi Sao Prima adalah pemenang pelelangan pengadaan sebagaimana Surat Keputusan Abdu Rahman, SE, MSi, Ak selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 068/KU.103/II/AKPAR-09 tanggal 28 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium Akdaemi Parawisata Makassar bahwa yang bertindak selaku penyedia barang atau rekanan adalah PT. Multi Sao Prima dengan Direktur Muhammad Ruslan, SE.

- Andi Makkarau selaku penerima kuasa yang menyediakan barang-barang peralatan pendidikan dan laboratorium yang disebutkan dalam dokumen penawaran yang kemudian akan diserahkan kepada pihak Akademi Pariwisata Makassar.

Setelah kontrak pengadaan peralatan pendidikan dan laboratorium ditandatangani maka selanjutnya penyediaan/pengadaan peralatan tersebut dilaksanakan oleh Andi Makkarau Mapangara, selaku kuasa direktur PT. Multi Sao Prima. Muhammad Ruslan, SE telah memberi kuasa kepada Andi Makkarau Mapangara untuk melaksanakan pengadaan peralatan tersebut karena dokumen penawarannya juga dibuat oleh Andi Makkarau Mapangara. Oleh karena itu Muhammad Ruslan, SE tidak pernah lagi mengecek

peralatan yang telah disediakan oleh Andi Makkarau Mapangara untuk diserahkan kepada Akademi Parawisata Makassar.

- Muhammad Ruslan, SE selaku Direktur PT. Multi Sao Prima menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan pihak Akademi Pariwisata Makassar.

Setelah tersedia peralatan yang ditawarkan, maka diserahkan kepada pihak Akademi Pariwisata Makassar. Muhammad Ruslan, SE ketika menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan juga sudah tidak memeriksa apakah barang yang diserahkan tersebut sudah sesuai dengan dokumen penawaran pada saat pelelangan pengadaan. Muhammad Ruslan, SE menyerahkan kepada Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa untuk mengadakan peralatan tersebut karena Andi Makkarau Mapangara juga yang membuat dokumen penawaran yang dimasukkan pada saat pelelangan pengadaan peralatan.

2. Terdakwa menyetujui perbuatan Andi Makkarau Mapangara yang mengirimkan barang-barang yang spesifikasi dan harganya tidak sesuai dengan harga penawaran, sehingga dirinya mendapat keuntungan yang tidak wajar.

Pengangkatan kuasa oleh Muhammad Ruslan, SE dalam kedudukannya seorang direksi haruslah mengedepankan prinsip *duty of care* meskipun prinsip *duty of care* ini tidak secara baku dinyatakan dalam undang-undang, namun hal tersebut mempunyai penafsiran

serupa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam memilih dan menentukan seorang kuasa, Muhammad Ruslan, SE selaku direksi haruslah mampu menilai karakteristik, sifat, keahlian, serta kemampuan bertanggung jawab dari seorang kuasa yang akan ditunjuknya dalam mewakili kepentingannya menjalankan tugas kepengurusan, apakah orang yang akan diangkat tersebut mampu dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan kuasa selayaknya direksi suatu perseroan dalam mengadakan pengurusan-pengurusan tertentu. Dengan kata lain, kuasa yang diangkat oleh direksi haruslah seseorang yang mempunyai *duty of care*, dikarenakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan adalah tindakan yang berlaku keluar terhadap pihak ketiga yang dapat memengaruhi bonafitas suatu perseroan dimana ia bertindak untuk dan atas namanya.

Berdasarkan putusan hakim yang menangani perkara tersebut menunjukkan suatu bentuk konsekuensi bahwa dalam hal penerima kuasa melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab penerima kuasa akan tetapi pemberi kuasa pun ikut bertanggung jawab. Hal tersebut disebabkan karena kelalaian dari Muhammad Ruslan, SE selaku direksi dan pemberi kuasa yang tidak melakukan pengecekan

terlebih dahulu terhadap barang yang diserahkan oleh penerima kuasa Andi Makkarau sudah sesuai atau tidak dengan dokumen penawaran yang dibuat sebelumnya oleh Andi Makkarau, sehingga oleh hakim Muhammad Ruslan, SE dianggap menyetujui tindakan merubah spesifikasi barang tersebut.

Menurut Penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini kurang tepat karena perbuatan Muhammad Ruslan, SE selaku Direktur PT. Multi Sao Prima yang menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan pihak Akademi Pariwisata Makassar atas penyerahan barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang dilakukan oleh Andi Makkarau Mapangara penerima kuasanya, tidak dapat dianggap bahwa Muhammad Ruslan, SE menyetujui perbuatan Andi Makkarau Mapangara tersebut. Sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa yang melakukan penyediaan barang/peralatan adalah Andi Makkarau Mapangara selaku penerima kuasa bukan Muhammad Ruslan, SE selaku pemberi kuasa. Oleh karena itu apabila dalam penyediaan barang/peralatan tersebut menimbulkan kemahalan sehingga berakibat ruginya keuangan negara jelas bukan dilakukan oleh Muhammad Ruslan, SE. Adapun jika terjadi ketidakjelian dalam menunjuk kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan, maka pemberi kuasa hanya bertanggung jawab secara perdata atas pemberian kuasa tersebut tidak sampai bertanggung jawab pidana karena pertanggungjawaban

pidana dalam hukum pidana hanya dapat dikenakan jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, sedangkan dalam perkara ini bukan Muhammad Ruslan, SE yang melakukan pengadaan barang/peralatan yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga Muhammad Ruslan, SE tidak dapat dipidana akan tetapi hanya dikenakan tuntutan ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya pengaturan pemberian kuasa dalam Pasal 1801 *BW* menetapkan bahwa penerima kuasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian) dalam menjalankan kuasanya dan Pasal 1797 *BW* yang menetapkan bahwa penerima kuasa dilarang melakukan perbuatan yang melampaui kuasa yang diberikan, apabila hal ini dilanggar maka akibat dari perbuatannya tersebut merupakan tanggung jawab pribadi penerima kuasa. Sedang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS/KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012, hakim memutuskan bahwa direksi selaku pemberi kuasa harus bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang telah dikuasakan, termasuk juga bertanggung jawab atas perbuatan penerima kuasa yang tidak dikuasakan. Ketika penerima kuasa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dikuasakan kepadanya, oleh pertimbangan hakim ini tetap merupakan tanggung jawab pemberi kuasa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1801 *BW* dan Pasal 1797 *BW* yang mengatur mengenai tindakan Penerima Kuasa yang melakukan perbuatan yang melampaui atau diluar dari yang dikuasakan.

2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap direksi selaku pemberi kuasa pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS.KOR/2012/PT.MKS, tanggal 13 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.Mks tanggal 12 Maret 2012 adalah bahwa direksi dan sekaligus pemberi kuasa, dianggap telah menyetujui dan bekerja sama dengan penerima kuasanya atas perbuatan penerima kuasa yang tidak dikuasakan, karena telah menandatangani berita acara serah terima barang tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu atas barang-barang yang telah dikuasakan kepada penerima kuasa, untuk melaksanakan pengadaan barang-barang tersebut sesuai dengan dokumen penawaran. Ternyata barang yang disediakan oleh penerima kuasanya tidak sesuai dengan dokumen penawaran (isi kontrak), sehingga terjadi kemahalan dan merugikan negara. Menurut pertimbangan hakim bahwa dalam tanggung jawab pidana, ketika penerima kuasa melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga tidak sesuai dengan perbuatan yang dikuasakan kepadanya dan akibat dari perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka pemberi kuasa selaku direksi harus bertanggung jawab pula secara pidana atas kesalahan/kelalaian yang ditimbulkan oleh penerima kuasa.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara, Hakim tetap berpedoman atau berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, khususnya peraturan-peraturan dalam *BW* mengenai pemberian kuasa, yaitu dalam Pasal 1801 *BW* dan Pasal 1797 *BW* dan tanggung jawab pemberi kuasa tidak diperluas sampai meliputi pada perbuatan yang tidak dikuasakan dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penerima kuasa.
2. Seharusnya Hakim mengimplementasikan asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan dalam memberikan putusan. Penerima kuasa dalam hal ini adalah pihak yang melakukan perbuatan pidana maka sudah sepatutnya dikenakan sanksi pidana akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan kuasa yang diberikan. Apabila menimbulkan kerugian dalam melaksanakan kuasa maka pemberi kuasa dapat bertanggung jawab secara perdata, yaitu memberikan ganti rugi. Sedangkan penerima kuasa yang melakukan perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana. Hal ini sesuai dalam hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana sehingga tidak ada pidana tanpa kesalahan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakri: Bandung.
- Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Evil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Dhaniswara K. Harjono. 2008. *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia: Jakarta.
- Dina Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran, dan Tanggung Jawab Direksi*. Tesis. hlm. 4. Magister Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara: Medan.
- Djaja S. Meliala. 2007. *Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum, tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Herlien Budiono. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)*. PT. Citra Aditya Bakri: Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.
- Munir Fuady. 1995. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Grup: Jakarta.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya: Bandung.

Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundangan-Undangan dan Yurisprudensi*. Kreasi Total Media: Yogyakarta.

Rusli Hardijan. 1996. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Rudhi Prasetya. 2014. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika: Jakarta.

Subekti. R. 1995. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakri: Bandung.

Tim Prima Pena. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Gita Media Press.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Tri Widiyono. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas. Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Yahya Harahap. M. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika: Jakarta.

Zulkifly dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*. Graha Media Press: Surabaya.

Sumber Internet :

Kamus Bahasa Indonesia *Online*.<http://kbbi.web.id>.